



Peran Muhammadiyah Dalam Membangun Etika Politik dan Kesadaran Demokrasi Dalam Pilkada Melalui Baitul Arqom

Supardiono ✉, Galih Bagus Soesilo, Agus Budi Santosa

Universitas Muhammadiyah Purworejo

Jl. KH. A. Dahlan 3 Purworejo, Jawa Tengah, 54111, Indonesia

supardiyono@umpwr.ac.id ✉ | DOI: <https://doi.org/10.37729/abdimas.v9i4.6352> |

Abstrak

Pemilu merupakan momentum penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia yang menghadirkan berbagai tantangan seperti polarisasi politik dan praktik politik transaksional. Muhammadiyah berperan aktif sebagai organisasi Islam yang mengedepankan nilai keadilan, persatuan, dan etika politik. Melalui dakwah, pendidikan politik, dan penguatan budaya politik berintegritas, Muhammadiyah membentuk pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. Sejarah panjang Muhammadiyah menunjukkan kontribusinya dalam konsolidasi kebangsaan, pendidikan, dan pelayanan sosial yang mendukung pembangunan bangsa. Sikap Independen Muhammadiyah dalam politik praktis menegaskan komitmen menjaga stabilitas sosial dan demokrasi sehat. Konsep Darul Ahdi Wa Syahadah menjadi landasan memperkuat NKRI sebagai negara Pancasila yang inklusif dan berkeadilan. Metode pengabdian dilakukan melalui ceramah dan diskusi interaktif dalam kegiatan Baitul Arqom untuk membangun kesadaran politik dan nilai etika peserta. Dengan pendekatan moderat dan progresif, Muhammadiyah berperan penting mengawal Pemilu demi masa depan bangsa yang adil, damai, dan sejahtera.

Kata Kunci: Etika politik, Pemilihan umum, Baitul arqam



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#)

1. Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan momen krusial dalam perjalanan demokrasi dan kehidupan berbangsa di Indonesia. Sebagai mekanisme demokrasi yang memungkinkan masyarakat memilih kepala daerah secara langsung, Pemilu tidak hanya berperan dalam menentukan arah pembangunan, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas politik dan sosial di tingkat nasional (Nurafni & Hertanto, 2025). Dalam konteks tersebut, peran organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah menjadi sangat strategis. Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar dan tertua di Indonesia, Muhammadiyah memiliki jejak sejarah panjang dalam mendukung pembangunan bangsa, baik di bidang pendidikan, sosial, maupun dalam ranah kebangsaan (Oktriyaning et al., 2024). Dikenal dengan pendekatan moderat dan progresif, Muhammadiyah menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, persatuan, serta kemajuan yang berlandaskan pada ajaran Islam yang mencerahkan.

Menjelang pelaksanaan Pemilu, tantangan demokrasi semakin kompleks, antara lain meningkatnya polarisasi politik, maraknya ujaran kebencian, dan praktik politik transaksional yang berpotensi menurunkan kualitas demokrasi (Shofa et al., 2024).

Dalam menghadapi situasi ini, Muhammadiyah memainkan peran aktif dalam menjaga kohesi sosial dan membangun kesadaran politik yang sehat di tengah Masyarakat (Mubarakah *et al.*, 2025). Melalui kegiatan dakwah, pendidikan politik, dan penguatan nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa, Muhammadiyah berusaha mendorong masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas, rasional, serta menjauhkan diri dari praktik politik uang dan korupsi.

Komitmen Muhammadiyah dalam memperkuat demokrasi juga tercermin dalam upayanya membangun budaya politik berintegritas, baik di kalangan anggotanya maupun masyarakat umum (Santosa & Rina Kurnia, 2021). Kesadaran politik yang sehat dan berbasis etika menjadi modal penting dalam menciptakan demokrasi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Di tengah pluralitas masyarakat Indonesia, peran Muhammadiyah sebagai pemersatu dan penjaga nilai-nilai kebangsaan menjadi sangat penting (Haq & Sahman, 2025). Kegiatan seperti *Baitul Arqom* yang dilaksanakan oleh Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Kulon Progo menjadi salah satu bentuk konkret dari upaya tersebut (A. Muttaqin *et al.*, 2025). Dalam kegiatan ini, materi tentang peran kebangsaan Muhammadiyah dan dinamika politik menjelang Pemilu menjadi sangat relevan dalam membekali warga Muhammadiyah agar lebih siap dan cerdas menghadapi realitas politik yang terus berkembang (Al-Hamdi, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa peran Muhammadiyah dalam Pemilu tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga substantif dan konstruktif dalam memperkuat kehidupan demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, Muhammadiyah tampil sebagai kekuatan moral, sosial, dan intelektual yang berperan aktif dalam mengawal demokrasi dan memperjuangkan masa depan bangsa yang lebih adil, damai, dan berkemajuan (Mubarakah *et al.*, 2025).

Baitul Arqom sebagai instrumen kaderisasi ideologis Muhammadiyah memiliki fungsi strategis dalam menanamkan nilai integritas, tanggung jawab, dan kepedulian kebangsaan, bagi warga persyarikatan. Penguatan etika politik melalui pendidikan kader semacam ini menjadi semakin krusial di tengah merebaknya pragmatisme politik, politik transaksional, serta rendahnya literasi demokrasi menjelang Pemilu. Oleh karena itu, pengabdian ini penting dilakukan sebagai bentuk kontribusi nyata Muhammadiyah dalam membangun basis etika politik yang kokoh sekaligus meningkatkan kesadaran demokrasi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan terwujud proses Pemilu yang lebih sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta semakin menegaskan peran Muhammadiyah sebagai kekuatan moral dan pencerah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Metode

Metode pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui pendekatan ceramah dan diskusi interaktif dalam kegiatan Baitul Arqom yang diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Kulon Progo. Ceramah disampaikan oleh narasumber yang kompeten di bidang politik dan etika sosial, dengan materi yang dirancang untuk membangun kesadaran politik yang sehat dan memperkuat nilai-nilai etika di kalangan peserta. Setelah sesi ceramah, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang memungkinkan peserta untuk menyampaikan pandangan, bertanya, dan berdialog secara kritis. Metode ini dipilih untuk menciptakan suasana pembelajaran yang partisipatif dan reflektif, sehingga peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai demokrasi yang adil dan berkelanjutan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun bagan pelaksanaan kegiatan dapat ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peran Muhammadiyah dalam Konsolidasi Awal Kebangsaan

Sejarah berdirinya bangsa Indonesia tidak hanya dibentuk oleh gerakan politik dan militer, tetapi juga oleh gerakan sosial dan keagamaan yang membantu konsolidasi identitas kebangsaan (Yupi *et al.*, 2024). Salah satu organisasi ini adalah Muhammadiyah, sebuah organisasi gerakan Islam modern yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta (Yupi *et al.*, 2024). Muhammadiyah tidak hanya berfokus pada pembaruan agama, melainkan pembaruan sosial yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan bangsa (Khoirudin *et al.*, 2025). Dalam konteks konsolidasi nasional sebelum keberadaan negara, Muhammadiyah memainkan peran penting secara nyata, terutama dalam pendidikan, kesehatan, dan pembekalan moralitas bangsa bernuansa Islam (Oktriyani *et al.*, 2024).

Peran Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak bisa diragukan lagi, menurut Muktasim Billah peran penting Muhammadiyah dalam mengkonsolidasikan bangsa sebelum kemerdekaan adalah (Billah, 2021), yaitu (1) Menyelenggarakan pendidikan untuk kaum bumiputra, termasuk di antaranya adalah buruh-buruh di sekitar Kauman (Edowansyah *et al.*, 2024). (2) Penyebaran Muhammadiyah ke berbagai daerah di Jawa, dan perlahan merambah ke Sumatera dan Sulawesi. Kemudian pada usianya yang baru tiga dekade, sudah hampir tersebar merata di seluruh Nusantara, lengkap dengan sekolah atau kegiatan pemberdayaan (Alya Aqilla *et al.*, 2024). Muhammadiyah mulai menerbitkan Soeara Moehammadijah pada 1915 dan majalah Soeara Aisjijah yang sudah dirintis melalui lembaran Isteri-Islam tahun 1925. Bahkan sudah menggunakan bahasa Melayu sejak 1921. (3) Mukhtar demi Mukhtar Muhammadiyah juga memberi peran penting dalam konsolidasi bangsa

Salah satu sumbangan paling penting dari Muhammadiyah adalah dalam bidang pendidikan. Pada masa penjajahan, pendidikan formal hanya diperuntukkan pada segolongan orang, terutama golongan priyayi dan komunitas Belanda (Fadhlurrahman, 2025). Sebaliknya pendekatan berbeda yang diterapkan Muhammadiyah adalah berdirinya sekolah-sekolah yang mengajarkan ajaran agama namun juga mengajarkan ilmu umum seperti ilmu pengetahuan, matematika, dan Bahasa (Astaman *et al.*, 2025). Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Darul Arqam ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Pemateri dan Peserta Darul Arqom

Sebagai tambahan, sekolah-sekolah Muhammadiyah itu menunjukkan bahwa pendidikan harus terbuka bagi semua orang. Bukan itu saja, pendidikan Muhammadiyah juga memperhatikan proses penanaman nilai-nilai nasionalis di dalam pendidikan itu (Mubarakah et al., 2025). Hasil-hasil lulusan dari sekolah Muhammadiyah juga menjadi tokoh-tokoh penting dalam pergerakan nasional.

Selain pendidikan, Muhammadiyah juga membangun lembaga dan jaringan sosial yang kuat melalui pendirian rumah sakit dan klinik yang tersebar di seluruh Indonesia. (Muhsi & Nurzannah, 2025) Layanan kesehatan ini tidak hanya memberikan perawatan medis, tetapi juga berfungsi sebagai alat konsolidasi sosial umat Islam dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu (Katili & Sastrawijaya, 2024). Dengan demikian, Muhammadiyah memperkuat solidaritas umat Islam di tengah pengawasan kolonial. Peran ini juga terlihat dalam kesiapsiagaan Muhammadiyah dalam penanggulangan bencana dan pelayanan kesehatan yang inklusif. Majalah *Soeara Moehammadiyah* memiliki peran penting dalam mengkonsolidasikan bangsa Indonesia (Prayogi & Saputro, 2025). Sebagai sarana komunikasi yang efektif, majalah ini menyatukan pandangan ke-Indonesiaan dan dibaca oleh berbagai kalangan di seluruh Hindia Belanda, terutama di daerah-daerah yang sudah berdiri cabang Muhammadiyah (Prayogi & Saputro, 2025). Penggunaan Bahasa Melayu sejak tahun 1921 menjadi titik krusial karena berhasil menyatukan bahasa komunikasi, jauh sebelum Sumpah Pemuda 1928 yang menetapkan Bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, yaitu Bahasa Indonesia (Al-Hamdi, 2023). Majalah ini membantu memperkuat identitas nasional dan kesadaran kebangsaan di kalangan umat Islam dan masyarakat luas.

Muhammadiyah memiliki peran yang sangat besar dalam mengkonsolidasikan bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan (Alisapaka et al., 2024). Organisasi ini tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan, tetapi juga aktif dalam bidang pendidikan, pelayanan sosial, dan pembaruan agama (No et al., 2025). Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah modern yang mengajarkan ilmu pengetahuan dan agama secara seimbang, serta menyediakan layanan sosial seperti rumah sakit dan panti asuhan (Shofa et al., 2024). Semangat nasionalisme yang kuat dalam Muhammadiyah turut memperkuat persatuan rakyat Indonesia, menjadi pilar penting dalam perjuangan kemerdekaan. Dengan pendekatan modern dan progresif, Muhammadiyah membantu membangun fondasi kebangsaan yang kokoh hingga Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945.

3.2. Peran Muhammadiyah dalam Merumuskan Ideologi Bangsa

Peran Muhammadiyah sebagai pendirian bangsa Indonesia tidak bisa dibantah lagi, tidak hanya peran kultural yang diperlihatkan tapi juga peran dalam pembentukan struktur kebangsaan Bangsa Indonesia (No *et al.*, 2025). Pada saat perjuangan kemerdekaan Indonesia, Jepang memperkenalkan tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan sebagai empat serangkai untuk menggambarkan betapa sentralnya mereka (Khoirudin *et al.*, 2025). Empat Serangkai tersebut adalah, Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hadjar Dewantoro, dan K.H. Mas Mansur. Tentu K.H. Mas Mansur dikenal sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah kala itu yang terpilih dalam Kongres Muhammadiyah di Yogyakarta pada tahun 1937 (Santosa & Rina Kurnia, 2021).

Peran K.H. Mas Mansur dalam perjuangan kemerdekaan dilanjutkan oleh penerusnya, Ki Bagus Hadikusumo (Budi *et al.*, 2021). Bersama tokoh Muhammadiyah lainnya seperti Prof. Kahar Mudzakir dan Mr. Kasman Singodimejo, Ki Bagus aktif berjuang di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Mereka memiliki peran penting dalam merumuskan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia (Shofa *et al.*, 2024). Ki Bagus Hadikusumo dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah yang gigih memperjuangkan agar nilai-nilai ajaran Islam turut diakomodasi dalam dasar negara. Dalam sidang-sidang BPUPKI, beliau menunjukkan keteguhan sikap dalam mempertahankan peran Islam, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan identitas bangsa yang inklusif dan berkeadilan (Santosa & Rina Kurnia, 2021).

Perjuangan Ki Bagus Hadikusumo dalam sidang BPUPKI sangat terlihat jelas, terutama dalam merumuskan Piagam Ja karta yang awalnya memuat kalimat "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" (Nufaisah *et al.*, 2021). Ki Bagus bersama tokoh Islam lainnya berusaha agar nilai-nilai agama Islam diakomodasi dalam dasar negara (Santosa & Rina Kurnia, 2021). Namun, demi menghormati keberagaman dan menjaga persatuan bangsa, beliau akhirnya menyetujui perubahan sila pertama menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa." Perubahan ini menunjukkan sikap kompromi Ki Bagus yang mengutamakan kesatuan bangsa sambil tetap mempertahankan prinsip moral dan spiritual yang diyakininya penting (Budi *et al.*, 2021).

Muhammadiyah memberikan kontribusi besar dalam merumuskan dasar negara Indonesia, khususnya dalam mengatur hubungan antara Islam dan negara (Fadhlurrahman, 2025). Sikap moderat Muhammadiyah dalam menyikapi isu ini sangat menentukan terciptanya kesepakatan nasional yang kokoh. Muhammadiyah mendukung Pancasila sebagai ideologi negara yang inklusif dan berkeadilan, yang mampu mempersatukan keberagaman bangsa. Organisasi ini menempatkan nilai-nilai moral dan spiritual sebagai landasan utama, namun tetap menghormati pluralitas masyarakat Indonesia (Alkhawarizmi, 2024). Dengan demikian, Muhammadiyah berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara nilai agama dan semangat kebangsaan (Budi *et al.*, 2021). Setelah Indonesia merdeka, Muhammadiyah tetap konsisten melanjutkan perjuangannya. Dalam dinamika politik nasional yang semakin kompleks, Muhammadiyah berusaha menjadi penyeimbang dengan tetap berpegang pada nilai moral dan keagamaan. Organisasi ini menolak dijadikan alat politik oleh pihak manapun, namun tidak ragu bersuara lantang ketika ada kebijakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepentingan rakyat (Hamdanny, 2021). Muhammadiyah terus berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan bangsa dengan pendekatan yang moderat dan inklusif, menjaga persatuan tanpa mengorbankan nilai-nilai agama.

Menurut Buya Syafii Maarif, Muhammadiyah dan perjalanan kebangsaan Indonesia ibarat satu tarikan nafas. Sejak didirikan Muhammadiyah tidak hanya bergerak dalam ranah keagamaan, tetapi juga dalam ranah kebangsaan. Muhammadiyah bekerja untuk umat adalah sejalan dengan perjuangan membangun bangsa, karena Muhammadiyah meyakini bahwa umat yang kuat adalah pondasi bagi bangsa yang kuat pula. Peran Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial menjadi kontribusi nyata dalam memperkuat sendi-sendi bangsa Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan (Yupi *et al.*, 2024). Upaya Muhammadiyah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan yang didirikannya, serta berbagai amal usaha di bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, telah menjadi bagian integral dari upaya membangun Indonesia yang berdaulat dan berkeadilan. Pemikiran-pemikiran progresif yang diusung oleh para tokoh Muhammadiyah, mengajarkan bahwa perjuangan umat Islam di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari perjuangan untuk memajukan bangsa secara keseluruhan (Raharjo *et al.*, 2024).

3.3. Konsep Darul Ahdi wa Syahadah

Komitmen kebangsaan Muhammadiyah tentang Negara kembali ditegaskan dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke 47 di Makassar pada tahun 2015, yaitu ditetapkannya konsep negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi Wa Syahadah*. Konsep ini lahir sebagai respons terhadap dinamika kebangsaan yang dihadapi Indonesia, dengan tujuan memberikan panduan tentang peran Muhammadiyah dalam menjaga dan memperkuat bangsa. Dalam konteks ini, *Darul Ahdi Wa Syahada* menjadi refleksi atas komitmen Muhammadiyah terhadap Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai Islam. Pandangan Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi Wa Syahadah*, berangkat dari tiga latar belakang utama (Nashir, 2008). Pertama, adanya kelompok-kelompok atau beberapa elemen masyarakat, terutama masyarakat muslim yang masih mempersoalkan relasi antara Islam dengan negara, dan mempersoalkan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kedua, adanya realitas bahwa sebagai bangsa ini secara ideologis belum merumuskan dengan sangat eksplisit dan membuat satu penjelasan akademik mengenai negara Pancasila itu. Ketiga, ada sebuah realitas dimana masyarakat Islam dianggap sebagai ancaman terhadap negara Pancasila (Nufaisah *et al.*, 2021).

Muhammadiyah memandang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 adalah negara Pancasila yang ditegakkan di atas falsafah kebangsaan yang luhur dan sejalan dengan ajaran Islam. secara esensi selaras dengan nilai nilai ajaran Islam dan dapat diisi serta diaktualisasikan menuju kehidupan yang dicita-citakan umat Islam yaitu *Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur* (No *et al.*, 2025). *Darul Ahdi* menurut adalah negara yang ditegakkan dan dibangun atas dasar perjanjian atau kesepakatan di antara seluruh rakyat warga negara. Muhammadiyah menegaskan pentingnya umat Islam untuk memegang teguh komitmen terhadap Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila; Muhammadiyah berupaya untuk terus memperkuat pilar-pilar kebangsaan, memastikan Indonesia tetap menjadi negara yang adil, makmur, dan sejahtera, yang menghormati pluralitas dan kebhinekaan.

Konsep *Darus Syahadah* (negara persaksian) lahir dari pemikiran bahwa umat Islam memiliki tanggung jawab sebagai ummatan wasathan, yaitu umat yang berada di tengah-tengah dan menjadi teladan. Dalam konteks ini, Muhammadiyah menegaskan bahwa umat Islam harus menjadi saksi atas keberlangsungan nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan di Indonesia (Yuliani *et al.*, 2025).

Kesaksian tersebut diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan sosial-ekonomi Masyarakat (Muhsi & Nurzannah, 2025). Kesaksian ini bukan sekadar retorika, melainkan aksi nyata yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga persatuan, keadilan, dan kemajuan bangsa. Dengan demikian, Muhammadiyah berperan sebagai penjaga moral dan spiritual bangsa Indonesia (Yuliani *et al.*, 2025).

3.4. Peran Kebangsaan di Bidang Ekonomi

Muhammadiyah menegaskan komitmennya terhadap pembangunan bangsa, termasuk di sektor ekonomi, dengan berlandaskan Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur perekonomian nasional dan prinsip demokrasi ekonomi (Prayogi & Saputro, 2025). Muhammadiyah memandang bahwa konsep kebangsaan di bidang ekonomi harus dijalankan dengan semangat keadilan sosial, menghindari eksploitasi sumber daya yang hanya menguntungkan segelintir pihak (Billah, 2021). Komitmen ini diwujudkan dalam upaya menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 menjadi fondasi utama komitmen Muhammadiyah dalam bidang ekonomi (Khakim, 2022). Ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ayat (2) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara; sedangkan ayat (3) menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Muhammadiyah memandang Pasal 33 ini sebagai wujud ekonomi berkeadilan sosial, di mana negara wajib hadir mengelola sumber daya strategis demi kepentingan rakyat dan mencegah kesenjangan yang merugikan masyarakat bawah. Komitmen ini juga tercermin dalam perjuangan Muhammadiyah melalui judicial review UU Sumber Daya Air (Khakim, 2022).

Muhammadiyah memahami bahwa Pasal 33 UUD 1945 adalah konstitusi ekonomi yang mengatur sistem perekonomian nasional yang adil dan mensejahterakan rakyat. Organisasi ini aktif mengadvokasi kebijakan ekonomi yang sejalan dengan semangat Pasal 33, terutama dalam pemberantasan kemiskinan sebagai masalah struktural yang harus diatasi dengan kebijakan pro-rakyat (Novemyanto, 2024). Muhammadiyah juga mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mengutamakan kepentingan rakyat banyak. Kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk segelintir elit. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang ditegaskan dalam Pasal 33 dan menjadi landasan perjuangan Muhammadiyah dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan (Novemyanto, 2024).

3.5. Peran Kebangsaan di Bidang Hukum

Dalam konteks pembentukan hukum, Muhammadiyah menekankan pentingnya nilai-nilai etika, keadilan, dan kemanusiaan sebagai dasar sistem hukum yang berkeadilan. Muhammadiyah tidak hanya mendukung supremasi hukum yang adil, tetapi juga menyoroti perlunya hukum yang menjamin kesejahteraan sosial dan menghormati hak asasi manusia. Organisasi ini mengawal tegaknya hukum melalui konsep jihad konstitusi, yang bukan berarti perjuangan bersenjata, melainkan perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan secara konstitusional (Muttaqin *et al.*, 2025). Jihad konstitusi menjadi wujud komitmen Muhammadiyah dalam memperjuangkan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan keagamaan.

Jihad konstitusi Muhammadiyah adalah upaya memperjuangkan dan menjaga tegaknya nilai-nilai konstitusi yang berlandaskan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan umum (Hamdanny, 2021). Muhammadiyah berupaya memastikan setiap peraturan perundang-undangan selaras dengan Pancasila, UUD 1945, dan prinsip ajaran Islam yang *Rahmatan lil 'Alamin*. Perjuangan ini merupakan proses panjang untuk mengawal kebijakan negara agar tetap berada dalam koridor keadilan sosial dan etika keagamaan. Melalui jihad konstitusi, Muhammadiyah berperan aktif dalam menjaga integritas hukum dan moral bangsa Indonesia (Khakim, 2022). Dalam beberapa dekade terakhir, Muhammadiyah telah mengambil langkah nyata dalam jihad konstitusi melalui jalur hukum, terutama dengan mengajukan *judicial review* terhadap berbagai undang-undang yang dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu contoh penting adalah pengajuan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Langkah ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak hanya aktif dalam diskursus hukum, tetapi juga berperan langsung dalam penegakan hukum yang berlandaskan nilai-nilai keadilan sosial dan prinsip-prinsip Islam. Jihad konstitusi ini merupakan bentuk ijtihad konkret Muhammadiyah dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan secara konstitusional.

3.6. Peran Kebangsaan Muhammadiyah Dalam Kehidupan Politik

Muhammadiyah dalam hal ini memainkan peran strategis dalam banyak aspek kehidupan bangsa, termasuk politik. Namun, sikap Muhammadiyah terhadap politik tidak serta-merta diartikan sebagai keterlibatan langsung dalam arena kekuasaan. Sebaliknya, Muhammadiyah menempatkan politik sebagai ruang bagi perjuangan moral dan kebangsaan dengan tetap berpegang pada khittah Muhammadiyah sebagai prinsip dasar yang menegaskan bahwa Muhammadiyah bukanlah organisasi politik, melainkan organisasi dakwah dan sosial kemasyarakatan (Muttaqin, 2025). Khittah dalam konteks Muhammadiyah berarti garis atau jalan perjuangan yang menjadi landasan etis dan operasional organisasi dalam menentukan arah gerak perjuangannya (Mubarakah *et al.*, 2025). Khittah Muhammadiyah merupakan seperangkat rumusan, teori, metode, sistem, strategi, dan taktik perjuangan yang mengarahkan organisasi untuk tidak terlibat dalam praktik politik praktis. Muhammadiyah menegaskan bahwa mereka tidak akan menjadi partai politik atau afiliasi dari partai politik tertentu, melainkan berdiri di atas semua golongan demi kepentingan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Namun demikian, sikap ini bukan berarti Muhammadiyah anti-politik. Muhammadiyah memandang politik sebagai sarana penting dalam mencapai cita-cita keadilan sosial, kesejahteraan, dan kemajuan bangsa.

Meskipun Muhammadiyah tidak terjun langsung ke ranah politik praktis, organisasi ini secara konsisten menyuarakan sikap politiknya dalam berbagai isu nasional yang strategis, seperti pendidikan, kesehatan, dan keadilan sosial (Al-Hamdi, 2023). Muhammadiyah aktif memberikan pandangan moral dan kritik konstruktif terhadap kebijakan negara, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Selain itu, Muhammadiyah berperan penting dalam membina kader bangsa yang berintegritas melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, agar mereka mampu berpartisipasi dalam kehidupan politik dengan tetap menjunjung tinggi prinsip etika (Al-Hamdi, 2023). Sikap ini tercermin dalam posisi Muhammadiyah yang mengambil sikap Independen dalam pemilu, namun tetap kritis dan loyal terhadap kepentingan bangsa.

Muhammadiyah selalu menegaskan sikap independen dalam setiap perhelatan pemilu maupun pemilu. Organisasi ini konsisten tidak memihak pada partai politik manapun, sesuai dengan khittah yang melarang keterlibatan dalam politik praktis. Namun, sikap independen ini bukan berarti pasif. Muhammadiyah memanfaatkan momentum pemilu untuk mengajak masyarakat memilih pemimpin yang berintegritas, bermoral tinggi, dan mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, Muhammadiyah membebaskan anggotanya untuk bergabung dalam tim sukses calon pilihan masing-masing secara pribadi, tanpa rekomendasi dari organisasi, dengan ketentuan harus cuti dari aktivitas organisasi selama masa tugas tersebut. Warga Muhammadiyah diharuskan mengedepankan etika dalam melakukan aktivitas politik sesuai dengan khittah organisasi yang menekankan visi membangun etika politik berlandaskan nilai-nilai Islam dan kemanusiaan. Muhammadiyah secara konsisten menyerukan perlunya politik yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan umum, bukan sekadar alat perebutan kekuasaan (Aminuddin & Kumalasari, 2024). Hal ini tercermin dalam berbagai pernyataan sikap Muhammadiyah yang mengkritisi fenomena korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan praktik politik yang merusak moralitas bangsa (Billah, 2021). Praktik *money politics*, yang berdampak buruk bagi pemerintahan dan moral bangsa, menjadi hal yang harus dihindari dan ditolak keras oleh Muhammadiyah.

3.7. Sikap Muhammadiyah dalam Pemilu

Menghadapi Pemilu, Muhammadiyah memandang penting untuk menegaskan kembali peran warga dan simpatisannya dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, kerukunan, dan stabilitas sosial. Sikap ini sejalan dengan konsep khittah Muhammadiyah yang menyerukan agar setiap warga Muhammadiyah memiliki tanggung jawab moral dan kebangsaan dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan dan beradab (Muttaqin *et al.*, 2025). Melalui panduan prinsip ini, Muhammadiyah menegaskan bahwa keterlibatan politik adalah suatu bentuk ibadah, yaitu dalam hal memperjuangkan nilai-nilai kebaikan bersama yang sesuai dengan ajaran Islam.

Sebagai organisasi Islam yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan kemanusiaan, Muhammadiyah mengedepankan prinsip politik nilai (Mubarakah *et al.*, 2025). Artinya, Muhammadiyah lebih memilih untuk berdiri pada posisi independen tidak terlibat dalam politik praktis, yakni dukungan terhadap partai politik atau calon tertentu. Namun demikian, ini bukan berarti Muhammadiyah mengabaikan aspek politik dalam kehidupan bernegara. Justru Muhammadiyah mengajarkan bahwa setiap warga negara, termasuk anggota Muhammadiyah, memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam kehidupan politik, terutama dalam menjaga agar politik berjalan sesuai etika dan nilai agama. Muhammadiyah memandang bahwa setiap warga negara, termasuk anggotanya, memiliki peran penting dalam Pemilu sebagai bagian dari hak dan kewajiban dalam kehidupan demokrasi (Astaman *et al.*, 2025). Muhammadiyah mendorong agar warganya terlibat aktif dalam pemilu dengan sikap kritis dan rasional. Pemahaman yang memadai tentang politik sangat diperlukan agar warga Muhammadiyah dapat membuat pilihan yang bijaksana (Khakim, 2022). Oleh karena itu, Muhammadiyah mengupayakan pendidikan politik bagi anggotanya agar mampu menilai calon kepala daerah secara objektif berdasarkan rekam jejak, kompetensi, dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat luas.

Dalam ajang Pemilu, suhu politik biasanya meningkat dan sering diwarnai persaingan ketat yang dapat menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat. Muhammadiyah menekankan pentingnya menjaga keberagaman dan persatuan dalam menghadapi dinamika tersebut.

Organisasi kemasyarakatan ini memandang Pemilu harus menjadi proses demokratis yang menguatkan kebersamaan, bukan ajang yang menimbulkan konflik horizontal antarpendingung calon. Sebagai organisasi yang dikenal dengan pendekatan moderat dan inklusif, Muhammadiyah mengajak warganya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan persatuan serta menghindari praktik-praktik yang dapat memecah belah persatuan. Dalam menghadapi Pemilu, Muhammadiyah melalui konsep *Darul Ahdi Wa Syahada* menegaskan komitmen untuk menjaga iklim demokrasi yang sehat, damai, dan adil. Sebagai organisasi yang mengedepankan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap aspek kehidupan, Muhammadiyah mengajak warganya untuk terlibat dalam pemilu dengan bijaksana, berpartisipasi aktif dalam pengawasan, dan menjaga persatuan di tengah keberagaman (Muttaqin, 2025). Dengan peran aktif dan cerdas dari warga Muhammadiyah, Pemilu diharapkan dapat melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang amanah, visioner, dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat luas.

4. Kesimpulan

Baitul Arqom merupakan instrumen kaderisasi ideologis Muhammadiyah yang strategis dalam menanamkan integritas, tanggung jawab, dan kepedulian kebangsaan, baik bagi warga persyarikatan maupun masyarakat luas. Di tengah meningkatnya pragmatisme politik, maraknya politik transaksional, serta rendahnya literasi demokrasi menjelang Pemilu, penguatan etika politik melalui pendidikan kader menjadi sangat mendesak. Pengabdian ini hadir sebagai kontribusi nyata Muhammadiyah dalam membangun basis etika politik yang kokoh sekaligus meningkatkan kesadaran demokrasi. Dengan demikian, diharapkan terwujud Pemilu yang sehat, berkeadilan, berkelanjutan, serta menegaskan Muhammadiyah sebagai kekuatan moral dan pencerah bangsa. Pengabdian ini berdampak penting dalam memperkuat etika politik warga Muhammadiyah, untuk meningkatkan literasi demokrasi, dan membangun kesadaran kritis masyarakat menjelang Pemilu. Melalui Baitul Arqom, Muhammadiyah meneguhkan peran strategisnya sebagai kekuatan moral yang mendorong lahirnya demokrasi yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia.

Acknowledgement

Terima kasih kepada Pimpinan Daerah Aisyiyah Kulon Progo yang terus bersama sama melakukan Pendidikan politik kepada Masyarakat, semoga pengabdian ini menjadi amal ibadah semuanya.

Daftar Pustaka

- Al-Hamdi, R. (2023). *115 tahun kepemimpinan Muhammadiyah: mengenal pimpinan pusat Muhammadiyah beserta Majelis Lembaga Biro, 1912-2027*. Penerbit Samudra Biru.
- Alisapaka, L. O., Yanto, L. Y., Hamin, L. O., Sampe, S. A., Gazalin, J., Pemerintahan, I., & Buton, U. M. (2024). *Muhammadiyah dalam Percaturan Calon Kepemimpinan Daerah*. 8, 34537-34542.
- Alkhawarizmi, A. (2024). Muhammadiyah dan Dinamika Politik. Suara Muhammadiyah. <https://www.suaramuhammadiyah.id/read/muhammadiyah-dan-dinamika-politik>

- Alya Aqilla, Putri Nailah Azahra, Rini Febrianti, Dhio Gonzales, Wismanto Wismanto, & Wira Ramashar. (2024). Muhammadiyah Sebagai Pelopor Gerakan Sosial dan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(1), 24–29. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i1.839>
- Aminuddin, A., & Kumalasari, I. (2024). Politik Uang Larangan Dalam Islam Dan Pencegahan Pada Pesta Pemilu 2024. *Warta Dharmawangsa*, 18(3), 643–656. <https://doi.org/10.46576/wdw.v18i3.4742>
- Astaman, Saripah, Hasyim Hadade, & Arnadi. (2025). Upaya Muhammadiyah Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam. *Tarbiya Islamica*, 13(1), 1–9. <https://doi.org/10.37567/ti.v13i1.3681>
- Billah, M. (2021). *Peran Muhammadiyah dalam menjaga nilai-nilai Pancasila*.
- Budi, Y., Santosa, P., Kurnia, R., & Hadikusumo, K. B. (2021). Kontribusi Ki Bagus Hadikusumo dalam Sidang BPUPKI Mei-Juli 1945 Ki Bagus Hadikusumo ' s contribution to the BPUPKI Session in May-July 1945 Kemerdekaan Indonesia bukan merupakan Indonesia. 2(3).
- Edowansyah, A., Sandi, A. T., & Aritonang, A. M. (2024, September). PERAN MUHAMMADIYAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN INDONESIA MELALUI EKONOMI. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (No. 1, pp. 430-436).
- Fadhlurrahman, F. (2025). Educational journey: from the Roman era, the Dutch colonial period, to Muhammadiyah in Indonesia. *Humanika*, 25(1), 35–48. <https://doi.org/10.21831/hum.v25i1.79883>
- Hamdanny, D. R. (2021). Dakwah Transformatif Muhammadiyah dalam Mewujudkan Masyarakat Madani melalui Jihad Konstitusi. *Jurnal Dakwah*, 22(1), 45–77. <https://doi.org/10.14421/jd.22.1.21.2>
- Haq, J., & Sahman, Z. (2025). Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah sebagai Paradigma Gerakan Sosial-Islam : *Kajian Teoretis dan Praktis*. 1(2), 148–154.
- Katili, A. M., & Sastrawijaya, C. (2024). Kontribusi Muhammadiyah Dalam Layanan Kesehatan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(12), 119–124. <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/574>
- Khakim, A., Azhari, A. F., & Harun, S. H. (2022). Jihad Konstitusi Muhammadiyah Terhadap Uu Sumber Daya Air (*Doctoral dissertation, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA*).
- Khoirudin, A., Tobroni, & Faridi. (2025). Penguatan Nilai-Nilai Keislaman Dan Kemuhammadiyahan Melalui Program Gerakan Jama'Ah Dan Dakwah Jama'Ah (Gjdj) Di Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri. *Studia Religia : Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 9(01), 23–29. <https://doi.org/10.30651/sr.v9i01.25515>
- Mubarakah, A. N., Anam, M. F. M., Nugraha, A. P., Gunawan. Willy, & Syamsul, E. M. (2025). Islam Modernis Dan Gerakan Pembaharuan Politik Organisasi Muhammadiyah. *Al-Akhbar: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 11 (1), 18–25.
- Muttaqin, A. A. (2025). Sikap muhammadiyah di tengah kontestasi pemilihan presiden pasca orde baru. *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies (IJMUS)*, 6(1), 32–44.
- Muttaqin, A., Zaeny, A., & Salim, L. (2025). Moderasi Agama dalam Perspektif Jamaah Tabligh, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama Lampung. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 8(1), 19–34. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v8i1.3946>
- Nashir. (2008). Muhammadiyah dan Politik. *Chemical Reviews*, 105(18), 3167–3196.

- No, V., Maret, J., Amin, M., & Malik, A. (2025). Peran Kebangsaan Muhammadiyah Dalam Pembangunan Identitas Nasional Di Indonesia. *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, 2(3), 630–636.
- Novemyanto, A. D. (2024). Konseptualisasi Penguatan Redistribusi Hasil Sumber Daya Alam pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. *Jurnal ESENSI HUKUM*, 6(1), 43–57.
- Nufaisah, N., Wahyudi, N. E. R., & Kusumastuti, E. (2021). Peran Agama dalam Pembentukan Dasar Falsafah Negara dan Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Atta'dib Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 25–44. <https://doi.org/10.30863/attadib.v2i1.1327>
- Nurafni, I., & Hertanto, H. (2025). Dinamika Pesta Demokrasi: Konflik dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Global Futuristik*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.59996/globalistik.v3i1.611>
- Oktriyani, O., Alvisyahri, N., & Fauzia, A. (2024). Pandangan Muhammadiyah tentang Islam Moderat untuk kemajuan peradaban Islam di Indonesia. *Masterpiece: Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 2(3), 141–153. <https://doi.org/10.62083/5vp99s82>
- Prayogi, A., & Saputro, A. D. (2025). Majalah Suara Muhammadiyah sebagai Amal Usaha dalam Mendukung Dakwah Islam di Era Modern: Satu Kajian Deskriptif. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), 663–673. <https://doi.org/10.61722/jmia>.
- Raharjo, T., AR, K., Febriyanti, Y., & Jannah, M. (2024). Dakwah Konstitusional Muhammadiyah: Antara Ideologi Islam Berkemajuan dan Komitmen Kebangsaan di Era Post Truth. *Masterpiece: Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 2(2), 99–109. <https://jurnalainpontianak.or.id/index.php/jrtie/article/view/3487/pdf>
- Santosa, Y. B. P., & Rina Kurnia. (2021). Kontribusi Ki Bagus Hadikusumo dalam Sidang BPUPKI Mei-Juli 1945. *Chronologia*, 2(3), 1–20. <https://doi.org/10.22236/jhe.v2i3.6419>
- Shofa, A. M. A., Alfaqi, M. Z., Habibi, M. M., Fattah, Z. W., Ramli, A. F., & Widiatmaka, P. (2024). Harmonisasi Polarisasi Politik Masyarakat Pasca Pemilu 2024 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Daerah Di Kota Surakarta. *Jurnal Civic Hukum*, 9(2), 125–137. <https://doi.org/10.22219/jch.v9i2.35801>
- Yuliani, Y., Sahman, Z., Kurniawati, S., & Hafiz, M. K. (2025). Membangun Karakter Bangsa melalui Kepribadian Muhammadiyah: Analisis Nilai, Etika, dan Spiritualitas dalam Gerakan Pendidikan Islam. *Integrating Religion, Social Economy, and Law: Conference Series*, 1(2), 66–72.
- Yupi Yani Telaumbanua, Rena Elpiana, Cindy Sri Wahyuni, Riska Aryanti, Wismanto Wismanto, & Wira Ramashar. (2024). Sejarah Muhammadiyah: Dari Awal Pendiariannya Hingga Perannya dalam Reformasi Sosial. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(1), 10–17. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i1.837>